

Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Tun Mahathir terhadap Investasi Megaprojek Tiongkok di Malaysia

Erdiatulha¹, Lalu Puttrawandi Karjaya¹, Khairur Rizki¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

erdiatulhaa@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the process of changing Tun Mahathir Mohamad's Foreign Policy towards Chinese megaprojects investment in Malaysia. After his re-inauguration as Prime Minister of Malaysia, Tun Mahathir decided to reject 14 MoU worth RM 143.64 Billion containing investment in Chinese projects in Malaysia and is a legacy of comprehensive cooperation between Najib Razak and China in 2016. The rejection was conveyed by Mahathir during his visit to China in August 2018 and, after that in April 2019, Mahathir changed his decision by resuming the megaproject that had been rejected. This research is a qualitative-descriptive research. Data are collected through literature studies and derived from secondary data, such as international relations theory books and articles from international relations journals. In analyzing Tun Mahathir's policy change process, this paper combines two models of foreign policy theory from Snyder which is Decision Making and Adaptive from Rosenau. The results showed that leadership were an important factor in the process of changing Mahathir policy and Supplementary Agreement becomes Mahathir's reference of foreign policy changes to Chinese megaprojects investment in Malaysia.

Keywords: *China Megaproject Investment, Foreign Policy, Rosenau's Adaptive, Snyder's Decision-Making, Supplementary Agreement.*

ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai proses perubahan Kebijakan Luar Negeri Tun Mahathir Mohamad terhadap investasi megaprojek Tiongkok di Malaysia. Pasca pelantikannya kembali sebagai Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir memutuskan untuk melakukan penolakan terhadap 14 MoU senilai RM 143,64 Miliar yang berisikan investasi proyek-proyek Tiongkok di Malaysia dan merupakan warisan kerjasama komprehensif antara Najib Razak dan Tiongkok pada tahun 2016. Penolakan tersebut disampaikan Mahathir dalam kunjungannya ke Tiongkok pada Agustus 2018 dan pada April 2019, Mahathir merubah keputusannya dengan melanjutkan kembali megaprojek yang sempat ditolak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan menggunakan data sekunder, seperti dari buku-buku teori Hubungan Internasional dan artikel-artikel dalam jurnal Hubungan Internasional. Dalam menganalisis proses perubahan kebijakan Tun Mahathir tersebut, tulisan ini mengkombinasikan dua model teori politik luar negeri dari Snyder yaitu Pengambilan Keputusan dan Adaptif dari Rosenau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor *leadership* menjadi faktor penting dalam proses perubahan kebijakan Mahathir dan *Supplementary Agreement* menjadi acuan terwujudnya perubahan kebijakan luar negeri Mahathir terhadap investasi megaprojek Tiongkok di Malaysia.

Kata Kunci: *Adaptif Rosenau, Investasi Megaprojek Tiongkok, Kebijakan Luar Negeri, Pengambilan Keputusan Snyder, Supplementary Agreement.*

PENDAHULUAN

Situasi Politik Internasional saat ini ditandai dengan kebangkitan ekonomi dari negara-negara *New Emerging Market*, salah satunya Tiongkok sehingga mengharuskan negara-negara di dunia melakukan pertimbangan yang matang dalam

melihat hubungan kerjasamanya dengan negara tersebut khususnya dalam bidang investasi. Kehadiran investasi diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara-negara di dunia terutama bagi negara berkembang seperti Malaysia. Malaysia yang ketika tulisan ini dibuat berada dibawah kepemimpinan Mahathir, menjadi salah satu negara yang dihadapkan pada situasi dimana melihat Tiongkok sebagai ancaman atau sebagai peluang dalam pertumbuhan ekonomi negaranya sehingga terjadi penyesuaian dan perubahan dalam kebijakan Mahathir terhadap investasi Megaproyek Tiongkok di Malaysia.

Pada masa pemerintahan Najib Razak, Malaysia menjadi negara pertama di ASEAN yang memberikan respon positif terhadap inisiatif dari Tiongkok yang dikenal dengan *Belt and Road Initiative* (BRI) (Saravanamuttu & Han, 2016). Respon Malaysia tersebut mendorong Tiongkok menjadi investor terbesar Malaysia dengan disepakatinya 14 *MoU* senilai RM 143,64 Miliar antara Najib Razak dan Tiongkok yang berisikan proyek-proyek investasi Tiongkok di Malaysia (Lee, 2016, p. 2). Dari 14 *MoU* tersebut, terdapat beberapa investasi yang belum memiliki estimasi nilai sehingga ditemukan data yang menunjukkan bahwa terdapat enam megaproyek Tiongkok di Malaysia dengan nilai investasi terbesar seperti Bandar Malaysia, *East Coast Rail Link* (ECRL), *Forest City, Melaka Gateway Project* hingga dua proyek pipa *Trans Sabah Gas Pipeline* dan *Multi-Product Pipeline*.

Dari enam megaproyek tersebut terdapat tiga megaproyek yang mendapat perhatian dari pemerintah dan rakyat Malaysia yakni ECRL dan dua proyek pipa. Hal ini dikarenakan ketiga megaproyek tersebut mendapatkan pinjaman dana besar-besaran dari *Exim Bank of China* sehingga Tiongkok diduga melakukan *bail-out* terhadap kasus skandal korupsi 1MDB Najib Razak (R.Latiff & Sipalan, 2019). Dari kasus korupsi tersebut, Najib Razak mendapat penolakan yang keras dari rakyat Malaysia sehingga Tun Mahathir Mohamad terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia ketujuh dan menjadi perdana menteri yang tertua di dunia (BBC News, 2018).

Pasca pelantikan Mahathir, berbagai agenda reformasi dilakukan termasuk melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh megaproyek Tiongkok di Malaysia sehingga Mahathir menengguhkan Bandar Malaysia dan ECRL serta membatalkan dua proyek pipa yang dinilai tidak transparan (Eka Yudha Saputra, 2018). Penolakan *Mahathir* tersebut disampaikan kepada pemerintah Tiongkok pada Agustus 2018 (Reuters, 2018). Namun, pada April 2019, Tun Mahathir merubah keputusannya dengan melanjutkan kembali investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia yang sempat ditolak sehingga dalam konteks ini, menarik untuk dianalisis mengenai perubahan Kebijakan Luar Negeri Malaysia dibawah rezim pemerintahan Tun Mahathir terhadap investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia. Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan sebuah pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana Proses Perubahan Kebijakan Luar Negeri Tun Mahathir Mohamad terhadap Investasi Megaproyek Tiongkok di Malaysia?

TINJAUAN PUSTAKA

Dari sejumlah tulisan, penulis belum menemukan karya tulis yang membahas secara spesifik terkait perubahan Kebijakan Luar Negeri Malaysia terhadap investasi megaproyek Tiongkok terutama pada rezim pemerintahan Tun Mahathir sehingga penelitian ini merupakan penelitian terbaru. Namun, penulis menemukan beberapa

tulisan yang terkait bahkan dapat mendukung penelitian penulis. Tulisan-tulisan tersebut di antaranya yaitu Investasi Tiongkok Pasca Degradasi Iklim Investasi 1MDB; Kepentingan Tiongkok Dalam Akuisisi Pelabuhan Hambantota Sri Lanka; dan Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok Menerapkan *Belt and Road Initiative* (BRI) Di Malaysia (2013-2017).

Artikel pertama dari Harisah Aini Auliya dalam Jurnal JOM FISIP dengan judul “Investasi Tiongkok Pasca Degradasi Iklim Investasi 1MDB”, membahas mengenai investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia pasca kejadian aset negara yang sedang bermasalah yakni 1MDB (*Malaysia Development Berhad*). Hasil penelitian Auliya menunjukkan bahwa melalui salah satu Teori Neoliberalisme yaitu Teori Saling Ketergantungan dari Keohane dan Nye menyatakan Tiongkok membutuhkan Malaysia dalam agenda *One Belt One Road* untuk menjaga suplai energi dan perluasan perdagangan Tiongkok. Sebaliknya, Malaysia dibawah pemerintahan Najib Razak membutuhkan Tiongkok untuk dapat memulihkan aset 1MDB yang sedang bermasalah melalui ‘bantuan’ investasi proyek-proyek yang didukung oleh Tiongkok (Auliya & Tjarsono, 2018, pp. 1–10).

Artikel kedua dari I Gst Arya Permana Putera dalam Jurnal Hubungan Internasional dengan judul “Kepentingan Tiongkok Dalam Akuisisi Pelabuhan Hambantota Sri Lanka”, membahas tentang Pelabuhan Hambantota yang merupakan tempat strategis bagi Tiongkok dimana satu diantara rute perdagangan maritim utama dunia telah berhasil diakuisisi Tiongkok dikarenakan ketidakmampuan Sri Lanka dalam membayar utang-utang pinjaman investasi Megaproyek yang dibangun oleh Tiongkok di Sri Lanka tersebut (Putera et al., 2019, pp. 11–14). Tulisan kedua dapat mendukung penelitian ini, dimana digambarkan dengan akuisisi yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut terhadap salah satu aset berharga Sri Lanka yaitu Pelabuhan Hambantota menjadi salah satu faktor dari alasan penolakan Tun Mahathir terhadap investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia. Mahathir tidak ingin ketergantungan pinjaman dana dari Tiongkok karena khawatir Malaysia akan bernasib yang sama dengan Sri Lanka mengingat utang Malaysia yang melambung tinggi dikarenakan skandal 1MDB.

Artikel ketiga dari Ngurah Gede Mahotama Jaya dalam Jurnal Hubungan Internasional dengan judul “Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok Menerapkan *Belt and Road Initiative* (BRI) Di Malaysia (2013-2017)”, membahas tentang Tiongkok yang menempatkan Malaysia sebagai salah satu negara strategis dalam jalur BRI dan memiliki berbagai kepentingan utama dalam mengimplementasikan inisiatif BRI di Malaysia. Dalam menganalisis, penelitian ini menggunakan dua konsep sebagai kerangka pemikiran yaitu Strategi Besar (*Grand Strategy*) dan Kepentingan Nasional (*National Interest*) yang berfokus pada kepentingan politik dan ekonomi Tiongkok dimana kepentingan utama Tiongkok dalam bidang ekonomi adalah untuk mengatasi ketergantungan sumber energi minyak Tiongkok dengan cara berinvestasi di Malaysia dengan membangun sejumlah megaproyek pelabuhan, jalur rel di Malaysia sebagai bagian dari inisiatif BRI (Jaya et al., 2019, pp. 1–12).

Berdasarkan rangkaian tinjauan pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa Malaysia menjadi salah satu mitra strategis bagi Tiongkok untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya sehingga Tiongkok sangat membutuhkan dukungan Malaysia terhadap BRI. Dukungan tersebut ditunjukkan oleh Malaysia pada masa pemerintahan Najib Razak hingga masuknya investasi megaproyek Tiongkok di

Malaysia. Namun, penelitian ini tidak akan membahas secara mendalam mengenai BRI ataupun Pelabuhan Hambantota karena ketiga penelitian terdahulu tersebut merupakan pendukung penelitian penulis dan penelitian ini merupakan penelitian terbaru yang murni membahas proses perubahan Kebijakan Luar Negeri Malaysia dibawah pemerintahan Tun Mahathir Mohamad terhadap investasi megeproyek Tiongkok di Malaysia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, pengumpulan data, analisis data secara induktif membangun dari rincian ke tema umum, hingga peneliti membuat interpretasi sebagai jawaban dari pertanyaan permasalahan yang telah disusun. Dikarenakan peneliti belum dapat terjun langsung ke lapangan untuk meneliti karya tulis ini, maka peneliti masih mengumpulkan data secara sekunder melalui buku-buku teori Hubungan Internasional dan artikel-artikel dalam jurnal Hubungan Internasional yang sebagian besar dalam bahasa inggris. Mengingat isu penolakan hingga perubahan kebijakan Mahathir merupakan isu yang sangat baru (2018-2019), sehingga penulis banyak mengambil data dari sebuah lembaga riset dan pendidikan di Singapura bernama Institut Yusof Ishak. Namun demikian, data sekunder yang didapatkan juga merupakan hasil dari penelitian dari pihak-pihak yang telah turun ke lokasi penelitian secara langsung.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam menjawab pertanyaan penelitian yang ada, penulis menggunakan teori yang relevan untuk menganalisis fenomena permasalahan yang diuraikan sebelumnya yaitu dengan menggunakan Teori Politik Luar Negeri. *Foreign Policy Theory* merupakan salah satu teori dalam studi Hubungan Internasional dan merupakan “Teori Kebijakan”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai tujuan tertentu (Perwita & Yani, 2005, p. 47). Teori ini sebagai sebuah studi dinilai dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara akan berfokus pada pelaku atau aktor. Sederhananya, analisis kebijakan luar negeri ini akan mempelajari proses, dampak, sebab, atau hasil pembuatan keputusan kebijakan luar negeri lewat perbandingan dan contoh kasus (Yani & MAIR, 2010). Oleh karena itu, penulis akan mengkombinasikan dua model dari teori politik luar negeri yaitu model pembuatan keputusan dari Richard C. Snyder dan model adaptif dari James N. Rosenau untuk menjawab bagaimana proses perubahan kebijakan luar negeri Tun Mahathir Mohamad terhadap investasi megaprojek Tiongkok di Malaysia.

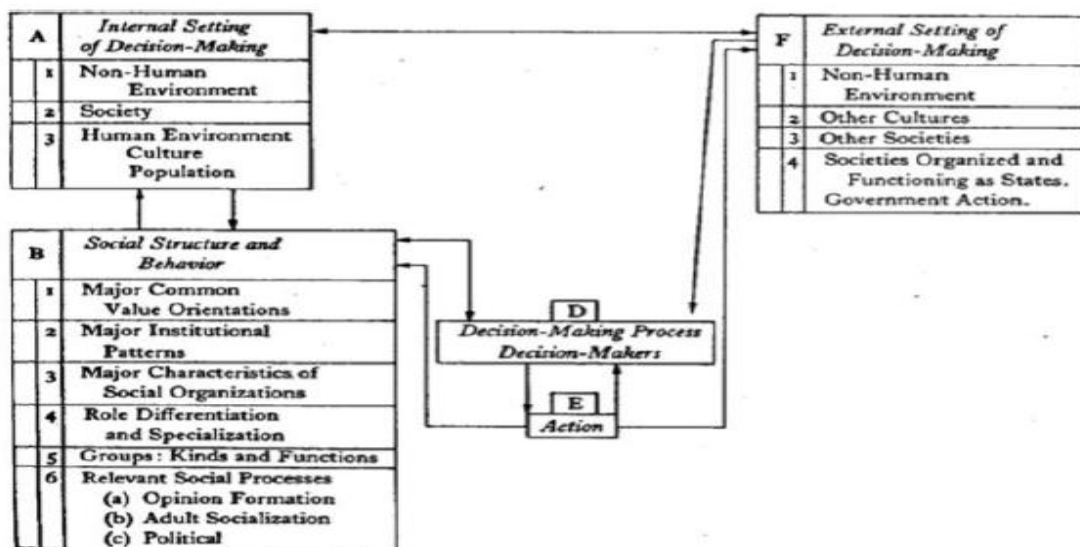
MODEL PEMBUATAN KEPUTUSAN (*THE DECISION MAKING MODEL*)

Pertama, penulis menggunakan Model Teori Politik Luar Negeri dari Richard C. Snyder yaitu Model Pembuatan Keputusan (*The Decision Making Model*) untuk menjelaskan alasan mengapa *Tun Mahathir* menolak investasi megaprojek Tiongkok di Malaysia. Model Pembuatan keputusan politik luar negeri ini muncul ketika seorang ilmuwan politik asal Amerika Serikat bernama Richard C. Snyder merasa tidak puas dengan Model Strategik/Model Rasional. Ia menganggap bahwa terdapat keterbatasan

atau kelemahan dari model ini yaitu asumsi mengenai perhitungan rasional dari para pembuat keputusan karena sebuah keputusan yang rasional bagi seseorang belum tentu rasional juga bagi orang lain (Yani & MAIR, 2010).

Dengan demikian, dari ketidakpuasan ini membuat Snyder berpikir bahwa pandangan tersebut tidak akan membantu menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri dapat terbentuk. Berlandaskan dari hal tersebut, Snyder bersama para pemikir lainnya, yaitu H.W. Bruck dan Burton Sapin berusaha untuk mengubah model tersebut. Mereka membuat sebuah model perumusan politik luar negeri yang lebih sederhana dimana di dalamnya membahas mengenai pentingnya *setting* atau faktor-faktor yang terdiri dari faktor internal dan eksternal yang dapat berpengaruh pada bagaimana suatu negara membentuk kebijakan luar negeri (Snyder et al., 1969, p. 202).

Gambar 1. *Internal and External Setting Snyder*



Sumber: (Snyder et al., 1969, p. 201)

INTERNAL SETTING OF DECISION MAKING

Pengambilan keputusan sebuah negara tentu tidak terlepas dari variabel utamanya yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang datang dari dalam atau domestik negara itu sendiri seperti keadaan dan situasi lingkungan domestik negara, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, dan pertahanan keamanan. *Setting* ini memiliki 3 unsur atau variabel yaitu *Non-Human Environment*, *Society*, dan *Human Environment, Culture, and Population*. Berikut penjelasan variabel-variabel dalam *Internal Setting of Decision Making* (Pratama, 2017, p. 14).

1. *Non-Human Environment* merupakan faktor lingkungan yang tidak berkaitan dengan manusia, seperti budaya, letak geografis, sumber daya atau kondisi perekonomian suatu negara.
2. *Society* merupakan kondisi karakter masyarakat dari suatu negara, tentang seberapa kritis atau partisipatif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sehingga dapat berpengaruh terhadap keputusan atau kebijakan pemerintah.

3. *Human Environment, Culture, and Population* terkait tentang lingkungan manusia, kebudayaan, dan populasi suatu negara dimana para *decision makers* memiliki nilai-nilai budaya yang tumbuh sejak ia tinggal di negara tersebut.

EXTERNAL SETTING OF DECISION MAKING

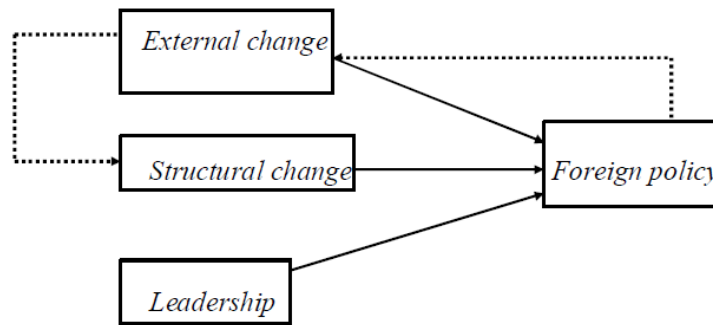
Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan atau kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datang dari luar negaranya atau kondisi di luar teritorial wilayah negara seperti situasi politik internasional, aliansi internasional dan konflik internasional (Snyder et al., 1969, p. 202). Faktor eksternal ini memiliki 4 faktor atau variabel, yaitu: (Pratama, 2017)

1. *Non-Human Environment* adalah faktor lingkungan non-manusia yang dapat mempengaruhi pembuat kebijakan yang berasal dari luar batas wilayah suatu negara berupa letak geografis atau kondisi ekonomi suatu Negara
2. *Other Cultures* atau kebudayaan negara lain merupakan faktor yang turut mempengaruhi perumusan kebijakan yang berasal dari budaya lain. Nilai-nilai budaya yang ada di dunia ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.
3. *Other Societies* merupakan faktor berupa opini kelompok masyarakat yang berada di luar negeri dan dapat menjadi pertimbangan *decision makers* dalam merumuskan kebijakan. Pendapat masyarakat internasional berpengaruh terhadap pembentukan citra suatu negara.
4. *Societies Organized and Functioning as States and Government Action* merupakan tindakan suatu negara terhadap negara lain dimana tindakan tersebut menjadi bahan pertimbangan negara lain.

MODEL ADAPTIF (*THE ADAPTIVE MODEL*)

Rosenau memandang politik luar negeri sebagai tindakan penyesuaian aktor (*adaptive behavior*), yang memiliki hubungan dengan beberapa hal seperti hidup dan mati, kemiskinan dan kesejahteraan, serta lain sebagainya. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan suatu mekanisme untuk negara-bangsa beradaptasi terhadap perubahan di lingkungannya (Rosenau, 1970, p. 366). Perubahan di lingkungan tersebut diproses di dalam benak para pembuat keputusan yang bertindak untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang-peluang didasarkan pada persepsi para pembuat keputusan. Fenomena *adaptive behavior* ini juga memiliki korelasi dengan individu selaku pemimpin negara, yang tentunya terdapat faktor *leadership* di dalamnya. Dengan demikian, dalam adaptasi ini terdapat tiga faktor yang memengaruhinya yakni *leadership*, pengaruh internal dan pengaruh eksternal yang digambarkan pada Bagan 1. sebagai berikut:

Bagan 1. Model Adaptif Politik Luar Negeri



Sumber: (Rosenau, 1974, p. 47)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa Rosenau mengidentifikasi beberapa jenis perubahan baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi dilakukannya adaptasi dalam politik luar negeri oleh pemimpin suatu negara. Jenis perubahan tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu perubahan personal atau personil, politik, dan sosial-ekonomi. Ketiga perubahan tersebut terjadi dalam ruang lingkup internal dan eksternal suatu negara. Dengan demikian terdapat tiga perubahan internal dan tiga perubahan eksternal yang mempengaruhi terjadinya adaptasi dalam politik luar negeri suatu negara (Rosenau, 1981, p. 43). Selanjutnya, menurut Rosenau, pengaruh *leadership* memiliki keterkaitan dengan persepsi, budaya politik, kepribadian dan latar belakang pemimpin tersebut (Rosenau, 1970, p. 373).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Semakin besar investasi suatu negara, maka akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai (Kholis et al., 2016, p. 66). Namun, kehadiran investasi juga dapat menjadi sebuah ancaman bagi negara berkembang seperti Malaysia ketika Tiongkok sebagai *home country* (negara pemberi investasi) tidak memberikan keuntungan yang signifikan terhadap negaranya. Hal ini berawal dari peningkatan FDI Tiongkok ke Malaysia pada tahun 2016 dimana terjadi kesepakatan antara Najib Razak (Perdana Menteri Malaysia periode 2009-2018) dengan Tiongkok pada 1 November 2016. Kesepakatan tersebut berupa 14 *Memorandum of Understanding* (MoU) yang berisikan 14 proyek Tiongkok yang akan dibangun bersama Pemerintah Malaysia dan terdapat beberapa proyek yang memiliki nilai investasi yang masih belum jelas sehingga diberikan lambang NA (*Not Available*) dalam MoU tersebut (Lee, 2016, p. 2).

Selain itu, terdapat enam proyek investasi yang memiliki nilai fantastis sehingga disebut sebagai megaprojek khususnya dalam bidang infrastruktur maupun *Real-Estate* (Lee, 2016, p. 7). Megaprojek tersebut dimulai dari nilai investasi terbesar yaitu Bandar Malaysia, *Forest City*, *East Coast Railway Link (ECRL)*, *Melaka Gateway Project* hingga dua proyek pipa yaitu *Trans Sabah Gas Pipeline* dan *Multi Product*

Pipeline. Dari keenam megaproyek, terdapat tiga megaproyek Tiongkok yang dinilai paling kontroversi untuk dibangun di Malaysia yaitu ECRL, dan dua proyek pipa (Lee, 2016, p. 27). Hal ini dikarenakan ketiga megaproyek tersebut dinilai memerlukan dana yang besar dan menggunakan pinjaman dana dari *Exim Bank of China*. Oleh karena itu, pasca pelantikan Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia ketujuh, Mahathir melakukan kunjungan ke Tiongkok pada Agustus 2018 untuk menyatakan penolakannya terhadap investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia.

Tun Mahathir memutuskan untuk menyampaikan kepada pemerintah Tiongkok pada hari terakhir kunjungannya bahwa Malaysia akan menanggukkan ECRL hingga pemerintah Tiongkok bersedia melakukan negosiasi dan membatalkan dua proyek pipa pada 21 Agustus 2018. Pembatalan proyek pipa tersebut dikarenakan total dana yang telah dibayarkan kepada CPPB untuk membangun kedua proyek pipa sebesar RM 8,25 Miliar yang merupakan 87,7% dari total nilai proyek telah dilunaskan. Namun, tingkat penyelesaian dari kedua megaproyek hanya sekitar 13% (kurang dari 15%) yang berarti tingkat pembayaran dan pengerjaan tidak sebanding sehingga menimbulkan kecurigaan oleh pemerintah Malaysia (The Sun Daily, 2019)

Namun, pada 12 April 2019, pemerintah Tiongkok menyatakan kesediannya untuk melakukan *bargaining* atau negosiasi bersama pemerintah Malaysia mengenai nasib megaproyek Tiongkok seperti ECRL dan Bandar Malaysia. Pasca kunjungan tersebut, Malaysia mengumumkan bahwa Malaysia telah berhasil mencapai kesepakatan dengan Tiongkok yang dikenal dengan Perjanjian Tambahan (*Supplementary Agreement*) yang menyatakan bahwa Bandar Malaysia dan ECRL akan dilanjutkan pembangunannya di Malaysia (Fook, 2019, p. 3). Mahathir kemudian mengubah kebijakan luar negerinya yang pada awalnya menolak megaproyek Tiongkok menjadi menerima kembali dengan menandatangani *Supplementary Agreement* pada kunjungan Mahathir ke Tiongkok pada 25 April 2019 (Fook, 2019, p. 4). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis proses perubahan kebijakan *Tun Mahathir* terhadap investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia.

ANALISIS KEBIJAKAN TUN MAHATHIR MENOLAK INVESTASI MEGAPROYEK TIONGKOK DI MALAYSIA

Pada sub-bab ini, penulis akan membahas mengenai alasan terbentuknya kebijakan Tun Mahathir menolak investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia. Dalam menjawab penelitian ini, penulis akan membagi alasan Tun Mahathir ke dalam dua kategori. Kategori-kategori tersebut yaitu faktor internal dan faktor eksternal dengan menggunakan teori model pembuatan keputusan dari Richard C. Snyder sebagai kerangka analisis dari penelitian ini.

Faktor Internal Tun Mahathir Mohamad Menolak Investasi Megaproyek Tiongkok di Malaysia

Dari tiga variabel faktor internal yaitu *Non-Human Environment*, *Society*, dan *Human Environment, Culture, and Population*, terdapat dua variabel dari faktor internal yang digunakan oleh penulis untuk menjawab alasan penolakan Tun Mahathir terhadap investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia yaitu *Non-Human Environment* dan *Society*.

Non Human Environment (Kondisi Ekonomi Malaysia)

Faktor internal pertama yang menjadi alasan penolakan Tun Mahathir terhadap investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia yaitu berkaitan dengan kondisi ekonomi dari negara Malaysia. Sejak tahun 2015, Malaysia dihadapkan dengan kasus korupsi dana milik negara yang dilakukan oleh Najib Razak yang dikenal dengan 1MDB (*1Malaysia Deveopment Berhad*) (Lee, 2019, p. 16). Pada 20 Mei 2018, Mahathir Mohamad mengumumkan bahwa Kementerian Keuangan Malaysia telah merilis detail uraian dari utang negara Malaysia mulai dari akhir tahun 2017 hingga akhir Juni 2018. Detail dari uraian utang yang dimiliki oleh negara Malaysia dari Kementerian Keuangan, ditunjukkan melalui tabel berikut (Lee, 2019, p. 23).

Berdasarkan Tabel 1, utang pemerintah federal yang mencapai RM 1 Triliun membuat Tun Mahathir Mohamad menolak investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia. Hal ini mengingat bahwa kepentingan Malaysia mengarah pada bagaimana pemerintah dapat melunasi utang-utang yang dimiliki dan tidak ingin menambah utang lebih banyak seperti pinjaman dana dengan suku bunga yang ditentukan oleh Tiongkok. Oleh karena itu, kondisi ekonomi Malaysia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan Tun Mahathir Mohamad untuk menanggukhan dan membatalkan investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia.

Tabel 1. Utang Negara Malaysia

| | RM Billion | | Share of GDP (%) | |
|--|------------|---------------|------------------|---------------|
| | End-2017 | End-June 2018 | End-2017 | End-June 2018 |
| Federal Government Debt | 686.8 | 752.2 | 50.7 | 50.7 |
| Committed Government Guarantees | 102.1 | 117.5 | 7.5 | 8.2 |
| 1MDB (Net Debt) | 38.3 | 38.3 | 2.8 | 2.7 |
| Other liabilities (PPP,PFI, and PBLT) | 260.1 | 184.9 | 19.2 | 12.9 |
| Total | 1,087.3 | 1,065.9 | 80.3 | 74.5 |

Sumber: (Lee, 2019)

Society (Pesimisme Rakyat Malaysia)

Faktor internal kedua yang mempengaruhi Tun Mahathir untuk menolak investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia yaitu pesimisme atau sikap pesimis dan skeptis dari rakyat Malaysia terhadap keuntungan yang akan didapatkan dari investasi megaproyek Tiongkok tersebut. Hal ini dibuktikan berdasarkan data dari The State of Southeast Asia 2019 Survey Report yang menunjukkan bahwa terjadi penolakan dari rakyat Malaysia mengenai investasi megaproyek Tiongkok yang dibangun di Malaysia melalui kerangka BRI (ASEAN Studies Centre, 2019, p. 19). Pada Gambar 2, dari kelima pilihan tersebut, terdapat satu pilihan yang menjadi acuan penulis untuk membuktikan bahwa megaproyek yang dibangun oleh Tiongkok di Malaysia tidak memberikan manfaat yang nyata bagi penduduk lokal.

Pilihan tersebut terdapat pada kategori kelima yaitu "*It will not succeed as most of its projects provide little benefit to local communities*" yang berarti bahwa BRI

Tiongkok tidak akan berhasil mengingat proyek-proyek yang dibangun di negara tujuan memberikan keuntungan yang sedikit bagi penduduk lokal dan Malaysia. Hal ini termasuk ke dalam *Top Three* dari 10 besar negara ASEAN yang merespon manfaat dari BRI tersebut sehingga jawaban ini membuktikan bahwa rakyat Malaysia merasa sangat pesimis mengenai keuntungan yang akan diperoleh dari investasi megaprojek Tiongkok di Malaysia. Sikap pesimis yang ditunjukkan tersebut menjadi salah satu bukti partisipatif dan kritis masyarakat di Malaysia sehingga akan mempengaruhi kebijakan Tun Mahathir Mohamad untuk menolak investasi megaprojek Tiongkok di Malaysia.

Gambar 2. Laporan Survey Penolakan Rakyat Malaysia

| Country | I will benefit regional economic growth and employment opportunities from China's Belt and Road Initiative | I perceive limited employment opportunities from BRI projects in this region | I do not want to engage in BRI projects due to lack of information | I will bring ASEAN member states closer to China's orbit | I will not support the most of the projects under the BRI |
|-------------------|--|--|--|--|---|
| Brunei Darussalam | 43.2% | 43.2% | 38.6% | 52.3% | 9.1% |
| Cambodia | 41.7% | 70.8% | 20.8% | 50.0% | 8.3% |
| Indonesia | 26.0% | 38.3% | 30.4% | 44.4% | 19.1% |
| Laos | 75.9% | 55.2% | 6.9% | 31.0% | 3.5% |
| Malaysia | 39.2% | 42.0% | 28.7% | 51.8% | 18.9% |
| Myanmar | 29.8% | 31.6% | 32.7% | 29.8% | 10.1% |
| Philippines | 27.0% | 25.2% | 34.2% | 38.7% | 18.9% |
| Singapore | 22.7% | 42.2% | 37.5% | 60.2% | 14.1% |
| Thailand | 37.2% | 37.2% | 16.8% | 51.3% | 16.8% |
| Vietnam | 9.9% | 13.2% | 38.0% | 58.7% | 20.7% |

Sumber: (ASEAN Studies Centre, 2019)

Faktor Eksternal Tun Mahathir Mohamad Menolak Investasi Megaprojek Tiongkok di Malaysia

Faktor eksternal memiliki 4 faktor atau variabel, yaitu *Non-Human Environment*, *Other Cultures*, *Other Societies*, dan *Societies Organized and Functioning as States and Government Action* (Snyder et al., 1969, p. 202). Dari keempat faktor yang terdapat dalam faktor eksternal, terdapat satu faktor utama yang mempengaruhi Tun Mahathir untuk menolak investasi megaprojek Tiongkok di Malaysia yaitu *Non-Human Environment*. *Non-Human Environment* mengacu pada kondisi ekonomi dari negara lain yaitu Sri Lanka. Situasi yang terjadi di Sri Lanka ini menjadi cerminan bagi rakyat dan pemerintah Malaysia untuk berhati-hati dengan investasi megaprojek Tiongkok di Malaysia mengingat ECRL menjadi salah satu proyek unggulan dari BRI dalam mengatasi *Malacca Dilemma* dari Tiongkok. ECRL yang dibangun menggunakan pinjaman dari Tiongkok kemungkinan besar akan menjebak negara dalam krisis utang. Hal ini dibuktikan berdasarkan data dari Survey Report ASEAN Studies Center untuk menunjukkan bahwa Malaysia mengingatkan pemerintah Malaysia untuk berhati-hati dalam negosiasi proyek-proyek BRI Tiongkok agar terhindar dari jebakan utang (ASEAN Studies Centre, 2019, p. 20).

Pada Gambar 3, dari keempat pilihan tersebut, terdapat satu pilihan yang menjadi acuan penulis untuk membuktikan bahwa proyek-proyek BRI Tiongkok merupakan diplomasi jebakan utang bagi Malaysia. Pilihan tersebut terdapat pada kategori ketiga yang menyatakan bahwa *“My government should be cautious in negotiating BRI projects to avoid getting into unsustainable financial debts with China”*, yang berarti bahwa negara Malaysia diminta untuk berhati-hati dalam menerima proyek-proyek BRI Tiongkok di negaranya karena akan menjebak negara dalam krisis utang. Untuk kategori tersebut, posisi pertama diraih oleh Malaysia sebesar 84,2% dan

Malaysia menjadi negara yang paling kuat dan percaya bahwa Tiongkok akan menjebak negaranya ke dalam krisis utang.

Gambar 3. Laporan Survei Responen terhadap Peristiwa Sri Lanka

| Country | The BRI benefits outweigh the potential economic and political risks. | My view on the BRI's positive impact has not changed, as those responses do not apply to my country. | My government should be cautious in negotiating BRI projects to avoid getting into unsustainable financial debts with China. | My country should avoid participating in BRI projects. |
|-------------------|---|--|--|--|
| Brunei Darussalam | 17.7% | 14.7% | 64.7% | 2.9% |
| Cambodia | 8.4% | 20.8% | 70.8% | 0.0% |
| Indonesia | 7.6% | 12.2% | 72.6% | 7.6% |
| Laos | 3.8% | 42.3% | 46.2% | 7.7% |
| Malaysia | 8.6% | 1.4% | 84.2% | 5.8% |
| Myanmar | 11.1% | 20.9% | 62.8% | 5.2% |
| Philippines | 10.7% | 4.9% | 78.6% | 5.8% |
| Thailand | 9.1% | 13.1% | 72.7% | 5.1% |
| Vietnam | 3.5% | 18.4% | 68.4% | 9.7% |

Sumber: (ASEAN Studies Centre, 2019)

Oleh karena itu, Mahathir sebagai pemimpin negara yang baru harus tegas dalam menanggapi kekhawatiran rakyat tersebut sehingga diperkuat dengan pernyataan dari Mahathir yang menilai BRI Tiongkok sebagai diplomasi jebakan utang (*debt-trap diplomacy*) (The Straits Times, 2019). Persepsi Tun Mahathir mengenai *debt trap diplomacy* Tiongkok mulai terkenal di dunia internasional dan menunjukkan citra yang negatif dari proyek-proyek BRI yang dibangun oleh Tiongkok. Hal ini berawal sejak Tiongkok mengakuisisi Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka dan akan menjadi semakin terkenal karena telah mampu mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari Tun Mahathir Mohamad dalam menolak investasi megaprojek Tiongkok di Malaysia mengingat Tun Mahathir merupakan pemimpin yang sangat berpengaruh di kawasan ASEAN.

ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN TUN MAHATHIR TERHADAP INVESTASI MEGAPROYEK TIONGKOK DI MALAYSIA

Pada sub-bab ini, penulis akan membahas mengenai perubahan terbentuknya kebijakan Tun Mahathir terhadap investasi megaprojek Tiongkok di Malaysia. Dalam menjawab penelitian ini, faktor penting yang menghasilkan perubahan kebijakan Tun Mahathir terhadap investasi megaprojek Tiongkok di Malaysia adalah faktor *leadership*. Menurut Rosenau, faktor *leadership* memiliki keterkaitan dengan persepsi, budaya politik, kepribadian dan latar belakang pemimpin tersebut (Rosenau, 1970, p. 373). Dalam menjawab penelitian ini, penulis menemukan bahwa faktor *leadership* merupakan aspek penting dalam proses perubahan kebijakan Tun Mahathir dari menolak hingga menerima kembali megaprojek Tiongkok tersebut, dimana berkaitan dengan persepsi dan retorika yang dibangun oleh Mahathir Mohamad sehingga Malaysia menerima kembali investasi megaprojek Tiongkok tersebut.

Tun Mahathir Mohamad yang berperan sebagai aktor utama atau pemimpin negara Malaysia tentunya menginginkan negaranya mendapatkan keuntungan dan manfaat dari investasi (FDI) yang masuk ke dalam negaranya terutama dari negara dengan kekuatan terbesar di dunia seperti Tiongkok (Shukry & Y.Ho, 2018). Untuk mencapai manfaat dan keuntungan yang diinginkan Mahathir melalui *bargaining* atau negosiasi kembali bersama dengan Tiongkok terkait investasi megaprojek Tiongkok di

Malaysia, Mahathir tentunya harus membangun retorika terlebih dahulu untuk menghapus citra negatif yang melekat pada Mahathir yakni dikenal sebagai sosok yang anti terhadap Tiongkok dikarenakan penolakan terhadap investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia (Jaipragas, 2017). Retorika tersebut ditunjukkan melalui dukungannya terhadap Tiongkok ketika Tiongkok dihadapkan dengan isu kebijakan Amerika Serikat di bawah Donald Trump untuk memberlakukan larangan terhadap penggunaan berbagai teknologi yang diproduksi oleh Huawei di Amerika Serikat atas dugaan ancaman keamanan dimana Huawei diyakini oleh Donald Trump sebagai upaya spionase militer Tiongkok.

Kebijakan Amerika Serikat tersebut telah mempengaruhi berbagai negara untuk memutuskan kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan Huawei milik negara Tiongkok, salah satunya Jepang. Namun, respon Malaysia dibawah pemerintahan Mahathir menunjukkan sikap sebaliknya dimana Mahathir menyatakan tetap akan menggunakan teknologi Huawei dan mengkritik Amerika Serikat atas kebijakan tersebut (Pinter Politik, 2019). Dukungan Mahathir terhadap Tiongkok dipengaruhi oleh kebijakan Mahathir yang tidak pro terhadap negara-negara Barat atau dikenal sebagai sosok pemimpin yang anti-Barat sejak awal kepemimpinannya periode 1981-2003 (Pinter Politik, 2019).

Selain itu, dukungan yang ditunjukkan oleh Mahathir terhadap perusahaan Tiongkok bertujuan menghapus citra negatif yang melekat terhadap dirinya dimana Mahathir dikenal sebagai sosok yang anti terhadap Tiongkok dikarenakan penolakan terhadap investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia. Penghapusan citra negatif melalui dukungan Mahathir diyakini sebagai upaya Mahathir untuk menguatkan retorika yang ingin dibangun. Namun, penguatan retorika tersebut tentunya harus mampu meyakinkan rakyat Malaysia bahwa investasi megaproyek Tiongkok dapat memberikan keuntungan dan manfaat terhadap Malaysia.

Upaya Mahathir untuk mengatasi kekhawatiran rakyat Malaysia dengan cara *Mahathir* akan meminta peningkatan persentase partisipasi lokal dalam pembangunan megaproyek Tiongkok di Malaysia mengingat sebelumnya hanya 30% perusahaan dan pekerja lokal yang dilibatkan dalam pembangunan megaproyek tidak menunjukkan manfaat yang nyata bagi penduduk lokal berdasarkan data dari Survey Report di ASEAN Studies Center (ASEAN Studies Centre, 2019, p. 19). Selain itu, Mahathir akan membujuk CCCC (kontraktor utama ECRL) agar Malaysia dilibatkan dalam mengelola implementasi dari *railway* atau jalan kereta api ECRL, berbagi resiko operasional dengan pemerintah Malaysia serta memikul tanggungjawab untuk menarik investor baru (Malgeri, 2019, p. 35). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan insentif dan membuat megaproyek dapat menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan demikian, upaya-upaya tersebut dalam rangka membangun optimisme rakyat dan negara Malaysia terhadap Tiongkok bahwa investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia dapat memberikan keuntungan.

Proses menuju perubahan kebijakan selanjutnya mengarah terhadap persepsi Tun Mahathir yakni mengacu pada peristiwa yang terjadi di Sri Lanka dimana negara tersebut mengalami krisis utang dikarenakan pembangunan megaproyek bersama Tiongkok sehingga Tiongkok dinilai oleh Mahathir melakukan "Diplomasi Jebakan Utang" (Fook, 2018, p. 2). Persepsi yang dibangun oleh Mahathir ini telah mampu mengurangi tingkat kepercayaan dari pendukung BRI Tiongkok, salah satunya negara

Pakistan. Berdasarkan data, pasca kebijakan Mahathir untuk menolak investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia, Pakistan menyatakan akan melakukan peninjauan ulang terhadap kesepakatan yang dibangun bersama Tiongkok terkait proyek-proyek BRI yang mendapatkan dukungan dana dari Tiongkok di Pakistan. Dengan demikian, penolakan dari Malaysia dan Pakistan telah membentuk citra negatif terhadap proyek-proyek BRI Tiongkok.

Untuk mengatasi hal tersebut, Tiongkok kemudian menerima tawaran *bargaining* dari Malaysia dibawah pemerintahan Mahathir Mohamad. Hal ini mengingatk bahwa Tiongkok mengakui Tun Mahathir Mohamad sebagai pemimpin yang sangat berpengaruh di ASEAN dan kawasan regional lainnya, sehingga jika hubungan Tiongkok dengan Mahathir tidak baik maka akan mempengaruhi tingkat stabilitas hubungan antara kedua negara bahkan hubungan Tiongkok dengan negara-negara ASEAN dan di kawasan lainnya (Malgeri, 2019, p. 38). Oleh karena itu, Tiongkok membutuhkan dukungan dari Mahathir Mohamad untuk menghapus citra negatif terhadap proyek-proyek BRI Tiongkok dan mendapatkan kembali kepercayaan negara-negara pendukung BRI untuk menunjukkan bahwa Tiongkok merupakan teman yang baik dan bersikap fleksibel dengan cara bersedia melakukan *bargaining* atau negosiasi jika suatu negara pendukung insiasinya terjebak dalam krisis seperti yang terjadi di Malaysia.

Selain itu, Tiongkok juga ingin mengurangi ketergantungan terhadap negara Singapura yang mulai pro terhadap negara-negara barat sehingga ECRL menjadi megaproyek strategis dan unggulan Tiongkok yang dinilai mampu mengatasi *Malacca Dilema* yang dialami oleh Tiongkok (Malgeri, 2019, p. 38). Melalui retorika dan persepsi yang dibangun oleh Mahathir di luar lingkungan negaranya telah berhasil menarik Tiongkok untuk masuk dalam *bargaining* yang ditawarkan oleh Malaysia sehingga pada 12 April 2019, Malaysia diundang oleh Tiongkok ke Beijing untuk memulai negosiasi bersama dengan Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa faktor *leadership* menjadi faktor yang kuat dalam mendorong terjadinya *bargaining* dan menghasilkan perubahan kebijakan dari Tun Mahathir serta Tiongkok dan Malaysia menyepakati sebuah perjanjian tambahan atau yang dikenal dengan *Supplementary Agreement* sebagai hasil dari *bargaining* kedua negara mengenai investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia, ditunjukkan oleh Gambar 4. (Fook, 2018, p. 4).

Gambar 4. *Supplementary Agreement Malaysia-China*

- (a) A Memorandum of Understanding (MoU) between the Malaysian Palm Oil Council Board (an agency under Malaysia's Primary Industries Ministry) and the China Chamber of Commerce of Import and Export of Foodstuff, Native Products and Animal By-products. (Under this MoU, China will purchase an additional 1.9 million tonnes of Malaysian palm oil at an estimated cost of RM4.56 billion over the next five years, i.e. from 2019 to 2023, and invest at least RM2 billion in a biojet fuel plant and RM200 million to produce unsaturated fats. The two countries further agreed to work together to encourage the use of renminbi for palm oil trade, subject to Bank Negara Malaysia's approval).¹⁴
- (b) An MoU between the Malaysian Investment Development Authority (MIDA) and China Communication Construction Company (CCCC) on the development of industrial parks and logistic hubs pursuant to the Supplementary Agreement that revived the ECRL. (CCCC is a China state-owned company that has entered into a 50:50 joint venture with Malaysia Rail Link to jointly develop the ECRL).
- (c) A framework agreement on the reinstatement of Bandar Malaysia between the original consortium members IWH and CREC on the one hand and the government of Malaysia on the other. (This agreement marks a step forward from the statement by the Prime Minister's Office of Malaysia on 19 April 2019 announcing the reinstatement of Bandar Malaysia).

Sumber: (Fook, 2019)

Tun Mahathir telah berhasil memanfaatkan faktor *leadership* atau faktor kepemimpinannya yang kuat untuk membuat Tiongkok tunduk terhadap *bargaining* yang diajukan oleh Malaysia melalui tiga poin penting dalam *Supplementary Agreement* pada Gambar 4. Hal ini menunjukkan bahwa Malaysia bersedia untuk melanjutkan kembali megaproyek Tiongkok yang telah ditangguhkan pada Agustus 2018 sebagai bentuk penolakan Tun Mahathir terhadap investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia dengan syarat bahwa Tiongkok harus membeli 1,9 juta ton CPO Malaysia selama lima tahun dari 2019-2023. Persyaratan ini diajukan oleh Malaysia untuk menutupi kerugian yang akan dialami oleh negaranya ketika Uni Eropa menetapkan peraturan larangan CPO.

Dengan demikian, *Supplementary Agreement* menjadi bukti keberhasilan faktor *leadership* Mahathir sehingga melalui perjanjian tersebut, menghasilkan perubahan kebijakan luar negeri Tun Mahathir terhadap investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia yang pada Agustus 2018 menolak menjadi menerima kembali investasi tersebut di Malaysia. Dalam *bargaining* mengenai megaproyek Tiongkok di Malaysia, Tun Mahathir Mohamad menerapkan istilah *Quid Pro Quo* dimana istilah ini bermakna sesuatu diterima untuk sesuatu yang lain dalam hubungan kerjasama dan negosiasi yang dilakukan kedua negara (Merriam Webster, 2019). Hal ini dilakukan Mahathir agar kesepakatan kedua negara mencapai *win-win solution* atau saling menguntungkan satu sama lain sesuai yang diharapkan oleh Tun Mahathir Mohamad dalam kerjasama investasi Malaysia dengan negara-negara di dunia termasuk Tiongkok.

KESIMPULAN

Proses perubahan kebijakan Tun Mahathir Mohamad terhadap investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia dimulai dari penolakan Mahathir pada tahun 2018 yang dianalisis menggunakan model teori politik luar negeri dari Snyder berdasarkan model pengambilan keputusan Snyder, penolakan Tun Mahathir dikarenakan faktor internal dan eksternal. Faktor internal mengacu pada kondisi perekonomian Malaysia yang sedang mengalami krisis utang dan penolakan Mahathir didukung oleh sikap pesimisme atau skeptis masyarakat Malaysia bahwa investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia dapat memberikan keuntungan. Sedangkan, faktor eksternal mengacu pada kondisi perekonomian Sri Lanka dimana Pelabuhan Hambantota diakuisisi oleh Tiongkok karena ketidakmampuan negara membayar utang dan Mahathir tidak ingin Malaysia memiliki nasib yang sama dengan Sri Lanka.

Namun, pada April 2019, Mahathir melanjutkan kembali investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia dan berdasarkan dari model adaptif Rosenau, perubahan kebijakan merupakan hasil pola adaptasi yang dilakukan oleh Mahathir dan faktor *leadership* menjadi faktor penting dalam perubahan kebijakan Mahathir. Hal ini dikarenakan retorika dan persepsi yang dibangun oleh Mahathir telah membuat Tiongkok memutuskan untuk menerima *bargaining* yang ditawarkan oleh Malaysia sehingga disepakatinya sebuah perjanjian tambahan yang dikenal dengan *Supplementary Agreement*. Perjanjian tersebut kemudian menjadi acuan terwujudnya perubahan kebijakan Tun Mahathir terhadap investasi megaproyek Tiongkok di Malaysia.

REFERENSI

- ASEAN Studies Centre. (2019). *ISEAS Yusof Ishak Institute: The State of Southeast Asia 2019 Survey Report*. https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/TheStateofSEASurveyReport_2019.pdf
- Auliya, H. A., & Tjarsono, I. (2018). Investasi Tiongkok Pasca Degradasi Iklim Investasi 1MDB. *Jurnal JOM FISIP*, 5(1), 1–11. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/18233>
- BBC News. (2018, May 10). *Malaysia's Mahathir Mohamad Sworn In After Shock Comeback Victory*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-44063675>
- Eka Yudha Saputra. (2018, May 31). *Menuju 100 Hari Kerja Mahathir Mohamad Mereformasi Malaysia*. Tempo. <https://dunia.tempo.co/read/1094235/menuju-100-hari-kerja-mahathir-mohamad-mereformasi-malaysia>
- Fook, L. L. (2018). *Mahathir's China Visit and Malaysia-China Relations: The View from China* (Working Paper No. 53; ISEAS Yusof Ishak Institute Perspective). https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_53@50.pdf
- Fook, L. L. (2019). *China-Malaysia Relations Back on Track?* (Working Paper No. 38; ISEAS Yusof Ishak Institute Perspective). https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2019_38.pdf
- Jaipragas, B. (2017, April 1). *Malaysia's Mahathir Mohamad on Why he's not anti-China*. South China Morning Post (SCMP). <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/2083820/exclusive-malaysias-mahathir-mohamad-why-hes-not-anti-china>
- Jaya, G. M., Priadarsini, N. W. R., & Widya, A. A. B. S. (2019). Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok Menerapkan Belt And Road Initiative (BRI Malaysia (2013-2017)). *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(1), 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/50816>
- Kholis, M., Astuti, D., & R. Febrianti. (2016). Hubungan Pendapatan Nasional dan Investasi di Indonesia (Suatu Kajian Ekonomi Makro dengan Model VAR). *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 12(1), 65–78. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.33830/jom.v12i1.48.2016>
- Lee, C. (2016). *Deepening of Malaysia's Economic Ties to China: What Are the Implications* (Working Paper No. 69; ISEAS Yusof Ishak Institute Perspective). https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/pdfs/ISEAS_Perspective_2016_69.pdf
- Lee, C. (2019). *Economic Reforms in the Aftermath of Regime Change in Malaysia* (Working Paper No. 9; ISEAS Yusof Ishak Institute Economics Working Paper Series). <https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/pdfs/ISEASEWP2019-9Lee.pdf>
- Malgeri, G. (2019). *Malaysia and the Belt and Road Initiative: an Agency Perspective of the ECRL Renegotiation Process* [University of Birmingham]. https://www.researchgate.net/publication/335724748_Malaysia_and_the_Belt_and_Road_Initiative_an_agency_perspective_of_the_East_Coast_Rail_Link_ECRL_renegotiation_process
- Merriam Webster. (2019). *Quid Pro Quo*. [https://www.merriam-webster.com/dictionary/quid pro quo](https://www.merriam-webster.com/dictionary/quid%20pro%20quo)
- Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pinter Politik. (2019, May 31). *Mahathir Teman Tiongkok, Jokowi Dilema?*

- <https://www.pinterpolitik.com/mahathir-teman-tiongkok-jokowi-dilema>
- Pratama, M. A. (2017). Keputusan Amerika Serikat Mencabut Pembatasan Ekspor Minyak Mentah Tahun 2015 [Universitas Jember]. In *Jurnal Skripsi Digital Repository* University Jember. https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/82740/Mirna_Ardiyanti_Pratama.pdf?sequence=1
- Putera, I. G. N. A. P., Fasisaka, I., & Prameswari, A. A. A. I. (2019). Kepentingan Tiongkok Dalam Akuisisi Pelabuhan Hambantota Sri Lanka. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(1), 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/47631>
- R.Latiff, & Sipalan, J. (2019, September 4). *Malaysia had Plan To Use Chinese Money To Bail Out 1MDB, Court Hears*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-malaysia-politics-najib/malaysia-had-plan-to-use-chinese-money-to-bail-out-1mdb-court-hears-idUSKCN1VP1DS>
- Reuters. (2018, August 21). *Malaysia's Mahathir Cancels China-Backed Rail Pipeline Projects*. <https://www.reuters.com/article/us-china-malaysia/malysias-mahathir-cancels-china-backed-rail-pipeline-projects-idUSKCN1L60DQ>
- Rosenau, J. N. (1970). Foreign Policy as Adaptive Behavior: Some Preliminary Notes for a Theoretical Model. *Comparative Politics*, 2(3), 367–376. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0002764270014001102>
- Rosenau, J. N. (Ed.). (1974). *Comparing Foreign Policies: Theories, Findings, and Methods* (1st ed.). Sage Publications.
- Rosenau, J. N. (1981). *The Study of Political Adaptation*. Nichols Publishing.
- Saravanamuttu, J., & Han, D. G. X. (2016, November 4). *Malaysia-China Relations: A New Turn?* RSIS Commentaries. Singapore: Nanyang Technological University. <https://dr.ntu.edu.sg/handle/10220/41724>
- Shukry, A., & Y.Ho. (2018, April 9). *Malaysia's Mahathir Pledges to Review China Investment if Re-Elected*. Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-08/mahathir-pledges-to-review-china-investment-after-malaysia-vote>
- Snyder, R. C., Bruck, H. W., & Sapin, B. (1969). *The Decision Making Approach to the Study of International Politics*. The Free Press.
- The Straits Times. (2019, March 7). *Beware of china 'debt trap', Malaysia's Mahathir tells the Philippines*. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/beware-of-china-debt-trap-malysias-mahathir-tells-the-philippines>
- The Sun Daily. (2019, July 17). *Malaysia Ready to Hold Talks with China Over Gas Pipeline Compensation: Tun M*. <https://www.thesundaily.my/local/malaysia-ready-to-hold-talks-with-china-over-gas-pipeline-compensation-tun-m-YB1120908>
- Yani, Y. M., & MAIR. (2010, June). *Perspektif-Perspektif Politik Luar Negeri: Teori dan Praksis*. Pustaka Universitas Padjajaran. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/perspektif_perspektif_politik_luar_negeri.pdf